

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Adji, Indriyanto Seno, 2009, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Media, Jakarta.

Arief, Barda Nawawi. 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

\_\_\_\_\_. 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

\_\_\_\_\_. 2000, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponogoro, Semarang.

\_\_\_\_\_. 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

\_\_\_\_\_. 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

\_\_\_\_\_. 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Atmasasmita, Romli. 2004, *Sektor Masalah Korupsi: Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Mandar Maju, Bandung.

Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2008, *Pengkajian Hukum Tentang Kriminalisasi, Pengembalian Aset Kerja Sama Internasional dalam Konvensi PBB*, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta.

Bonger, W.A. 1988, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan, Jakarta.

Gosita, Arif. 1983, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, Akademika Pressindo, Jakarta.

Hamzah, Andi. 2007, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Hartati, Evi. 2006. *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika, Jakarta.

Hiariej Eddy O.S, dan Saldi Isra. 2009, *Perspektif Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, dalam Wijoyanto dan Ridwan Zachrie (editor),

*Korupsi Mengkorupsi Indonesia: Sebab, Akibat dan Prospek Pemberantasan*, Gramedia Pustaka Umum, Jakarta.

Hiariej, Eddy O.S. 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Kiltgaard, Robert, dkk. 2002, *Penuntutan Pemberantasan Korupsi Dalam Pemerintahan Daerah*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Krstiana, Yudi. 2009, *Menuju Kejaksaaan Progresif: studi Tentang Penyelidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi*, Masyarakat Transparansi Indonesia Bekerjasama dengan National Legal Reform Program (NLRP), Jakarta.

Lamintang. 2007, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Muzila, Lindy, dkk. 2012, *On Take Criminalizing Illicit Enrichment to Fight Corruption*, The World Bank. Washington DC.

Marzuki, Peter Mahmud. 2007, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Ketiga, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

\_\_\_\_\_. 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

M. Yanuar, Purwaning. 2007, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, Alumni, Bandung.

Moeljatno. 2008, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Mugihardjo. 2014, “*Korupsi dalam Menyongsong Era Liberisasi*,” *Suara Pembaruan Online*, 1997 dalam Chaerul Amir, *Kejaksaaan Memberantas Korupsi*, Deleader, Jakarta.

Muhammad, Rusli. 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.

Muhammad, Yusuf. 2013. *Merampas Aset Koruptor: Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Kompas, Jakarta.

Mukti Fajar N.D, Yulanto Ahmad. 2010, *Dualisme Penelitian Hukum : Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Muladi, Lilik. 2000, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana, Perspektif, Teoretis, dan Praktik*, PT. Alumni, Bandung.

- Muladi, Barda Nawawi Arief. 1984, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- \_\_\_\_\_. 2005, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, PT. Alumni, Bandung.
- Muladi. 2008, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung.
- Poernomo, Bambang. 1987, *Pola Dasar Teori Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_. 1988, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta Buku, Yogyakarta.
- Poerwadarminta, W.J.S. 1984, *Kamus Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta.
- Pohan, Agustinus, dkk. 2008, *Pengembalian Aset Kejahatan*, Pusat Kajian Anti (PuKAT) Korupsi Fakultas Hukum UGM bekerjasama dengan Kemitraan, Yogyakarta.
- Prasetyo, Teguh. 2010, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.
- R.Wiyono. 2005, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Saldi, Saparinah. 1976, *Presepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum. 2011, *Illicit Enrichment: Kriminalisasi Peningkatan Kekayaan Tidak Wajar*, Satgas PMH, Jakarta.
- Semma, Mansyur. 2008, *Negara dan Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia-Press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudarto, 1977, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 104 (Kutipan dari David L. Sills, 1986, editor, *International Encyclopedia of The Social Sciences*, Volume 13 dan 14, Collier-Madmilln Publisers, London).

Teguh Prasetyo, dan Abdul Halim, Barkatullah. 2005, *Politik Hukum Pidana*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Tongat, 2008, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan*, UPT Penerbitan UMM, Malang,

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003). (Lembaran Negara Tahun 2006, Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5316).

*United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).

*Criminal Law of The Peoples Republic of China*.

*Anti-Corruption Act 1997 Malaysia*.

## **C. Jurnal, Internet**

Kennedy, Anthoney. 2006, "Designing a Civil Forfeiture System: an Issues List for Policymakers and Legislators", *Jurnal of Financial Crime*, Vol. 13, No. 2.

- SINGG H, 2002, “Dunia pun Memerang Korupsi, Beberapa Catatan dari Internasional Anti Corruption SATU- X dan Dokumen PBB tentang Pemberantasan Korupsi”, Pusat Studi Bisnis Universitas Pelita Harapan, Tangerang.
- ICW, “Jumlah Tersangka Kasus Korupsi Ribuan di Periode 2014”, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54febb754288e/icw--jumlah-tersangka-kasus-korupsi-ribuan-di-periode-2014>, Tanggal 24 Maret 2017.
- ICW, “Bulletin Mingguan Anti Korupsi 14-18 September 2015”, <http://www.antikorupsi.org/id/content/bulletin-mingguan-anti-korupsi-14-18-september-2015>, Tanggal 24 Maret 2017.
- ICW, “500 Orang Jadi Tersangka Kasus Korupsi Sepanjang Januari-Jun 2016”, <http://news.detik.com/berita/3285348/icw-500-orang-jadi-tersangka-kasus-korupsi-sepanjang-januari-juni-2016>, Tanggal 24 Maret 2017.
- Isra, Saldi. “Asset Recovery Tindak Pidana Korupsi melalui Kerjasama Internasional”, <http://www.saldisra.web.htm>, Tanggal 10 Januari 2017.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://kbbi.web.id>.